



**WAJAH BARU ALAT KELENGKAPAN DPRD KOTA YOGYAKARTA**

## Terbentuk, Komisi B Siap 'Berlari' Awasi Optimalisasi PAD

**Ketua Komisi B, Mohammad Sofyan**      **Wakil Ketua Komisi B, Danang Rudyatmoko**      **Sekretaris Komisi B, Munazar**

**YOGYA (KR)** - Komisi B menjadi salah satu alat perlengkapan (alkap) DPRD Kota Yogyakarta yang memiliki ketegasan strategis. Hal ini tak lepas dari tupoksinya dalam mengawal urusan ekonomi yang dijalankan oleh tim eksekutif. Seiring terbentuknya jajaran unsur pimpinan dan

Sigit Nurcahyo (Fraksi PDI Perjuangan), Oleg Yohan (Fraksi NasDem), Krisnadi Setyawan (Fraksi Gerindra), Fajar Kurniawan (Fraksi PKS), dan I Dewa Putu Adhi Yogana (Fraksi PPP).

Ketegasan Komisi B pada urusan perekonomian dan keuangan memang cukup strategis. Tanpa mengesampingkan aspek lainnya, aktivitas perekonomian cukup

**Ipung Purwandari**      **Sigit Nurcahyo**      **Oleg Yohan**      **Krisnadi Setyawan**      **I Dewa Putu Adhi Yogana**      **Fajar Kurniawan**

anggota, Komisi B pun siap berlari dalam mengawasi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Jajaran pimpinan dan anggota Komisi B yang telah ditetapkan pekan lalu, berjumlah sembilan orang. Seluruhnya merupakan wakil dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kota Yogyakarta masa jabatan 2024-2029. Terdiri dari Ketua: Mohammad Sofyan (Fraksi PAN), Wakil Ketua: Danang Rudyatmoko (Fraksi PDI Perjuangan), Sekretaris: Munazar (Fraksi Golkar) serta jajaran anggota: Ipung Purwandari (Fraksi PDI Perjuangan),

berperan aktif terhadap keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mitra kerja Komisi B hampir menyentuh semua dinas yang berkaitan dengan pendapatan. Dalam menjalankan fungsinya, Komisi B akan lebih banyak melakukan koordinasi dengan mitra kerja. Tujuan ke wilayah juga bakal kerap dilakukan guna memastikan program pemerintah di bidang ekonomi berjalan dengan baik.

Ketua Komisi B Mohammad Sofyan mengungkapkan ketegasan pertama yang akan dilakukannya ialah pembahasan RAPBD Kota Yogya tahun 2025 bersama mitra kerja eksekutif. "Kami akan fokus mencermati industri pariwisata dan berbagai turunannya di Kota Yogya banyak ditopang oleh industri pariwisata mulai dari akomodasi, transportasi hingga pelaku UMKM. Menggeliatnya tingkat kunjungan wisatawan harapannya mampu meningkatkan perputaran uang yang dirasakan hingga lapisan masyarakat paling bawah. Kondisi tersebut pun idealnya turut mendorong PAD," urainya.

Dicontohkannya meningkatnya kunjungan wisatawan selama ini banyak dirasakan manfaatnya oleh kalangan perhotelan, restoran, destinasi wisata, jasa parkir, toko oleh-oleh, jasa transportasi dan lainnya. Akan tetapi pasar tradisional juga memiliki potensi yang tidak kalah menarik untuk menjadi jujugan wisatawan. Terutama pasar yang terletak di kawasan premium atau pusat kota dan berdekatan dengan destinasi wisata. Komisi B akan mengusulkan ada standarisasi pasar tradisional dengan mengedepankan kearifan lokal, sehingga dalam melakukan penataan ada pedoman dari sisi display dagangan, jenis dagangan hingga konsep bangunan fisik.

Secara bertahap, seluruh pasar di Kota Yogyakarta yang kini berjumlah 29 pasar perlu upaya penataan yang berkesinambungan. Penataan itu tidak harus dengan merogoh kocek APBD melainkan mengakses berbagai pos pendanaan lain. Seperti halnya rehabilitasi Pasar Sentul yang tahun lalu dialokasikan dari dana keistimewaan maupun revitalisasi Pasar Pratiwirodaman beberapa tahun lalu yang seluruhnya ducukupi melalui Dana Alokasi

Khusus (DAK).

Begitu pula pemerataan wisawatan hingga ke perkampungan masih perlu penguatan dari pemerintah. Keberadaan kampung-kampung wisata seharusnya mampu menjadi kekuatan dan daya tarik. Apalagi saat ini tengah digencarkannya sentra industri yang berbasis wilayah. Petisian sentra industri tersebut idealnya meliputi dari hulu hingga hilir. Terutama menyangkut siapa yang menyediakan bahan baku, pihak yang melakukan produksi, proses pengemasan hingga promosi. Jika dalam sentra industri sudah mencakup seluruh aspek itu, maka keberadaannya akan memperkuat kampung wisata.

Sedangkan terkait PAD, menurut Wakil Ketua Komisi B Danang Rudyatmoko, mendapat perhatian tersendiri. Hal ini karena pada tahun depan diwacanakan PAD mencapai Rp 1 triliun atau naik hingga Rp 300 miliar dibanding tahun ini. Pihaknya mendukung komitmen peningkatan PAD lantaran akan berdampak baik bagi kemandirian ekonomi daerah. Hanya harus dipastikan target tersebut mampu benar-benar diwujudkan melalui optimalisasi setiap potensi. (DHI)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005